

ANALISIS PERKEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PASKA PENERAPAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BIREUEN (2004-2010)

Sri Wahyuni

Dosen Fakultas Ekonomi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menjelaskan perkembangan pendapatan asli daerah pasca penerapan otonomi daerah di Kabupaten Bireuen. Manfaat penelitian ini adalah: 1) sebagai acuan pemerintah dalam mengevaluasi sumber PAD yang diperoleh serta dapat menggali lebih optimal lagi potensi yang ada, 2) sebagai peningkatan partisipasi pihak swasta dan masyarakat dalam meningkatkan sumber PAD. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Data yang dikumpulkan merupakan data sekunder yaitu pendapatan asli daerah pasca penerapan otonomi daerah tahun 2004 sampai dengan 2010. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah: 1) Perekonomian Kabupaten Bireuen mengalami *recovery* dari tahun 2004 sampai dengan 2009. Namun pada tahun 2010, perekonomian mengalami *resesi*, 2) Sumber penerimaan pendapatan asli daerah belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dengan kerugian BUMD yang dialami sebesar Rp. 20.289.886,-, 3) Sumber penerimaan pajak, retribusi daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sudah mulai meningkat. Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah: 1) Pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah harus dapat mengevaluasi penyebab keberhasilan dan kegagalan peningkatan sumber pendapatan asli daerah, 2) Melalui otonomi daerah, pihak pemerintah, swasta dan masyarakat dapat menggali potensi-potensi daerah Kabupaten Bireuen.

Kata Kunci: Perkembangan Asli Daerah, Otonomi Daerah

1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara sedang berkembang mengharapkan perekonominya dalam keadaan *recovery*. *Recovery* perekonomian dapat diwujudkan dalam pembangunan yang dirancang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan dilakukan di tingkat pusat dan di tingkat daerah secara menyeluruh dan berkesinambungan. Pemerintah pusat dalam mendukung

pembangunan di daerah memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah (desentralisasi). Otonomi daerah ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dimana telah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengelola pembangunan sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus menggali potensi-potensi daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). PAD sangat berperan penting dalam pembangunan.

Pemerintahan Kabupaten Bireuen sejak diberlakukan otonomi daerah terus mencari alternatif sumber PAD dalam pembiayaan pembangunan. Sumber PAD Kabupaten Bireuen selama ini adalah pajak dan retribusi daerah. Pajak dan retribusi daerah akan semakin meningkat apabila sektor swasta dan perusahaan milik daerah juga ikut meningkat. Namun, dalam mencari berbagai alternatif sumber PAD, pemerintah Kabupaten Bireuen menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Hal ini terbukti masih kurangnya investor domestik maupun asing yang menanamkan modalnya untuk pembangunan di Kabupaten Bireuen. Masih belum optimalnya sumber penerimaan dari perusahaan milik daerah. Sehingga pemerintah Kabupaten Bireuen harus mampu untuk mengelola keuangan dalam pembangunan ekonomi.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik menjawab permasalahan bagaimanakan perkembangan pendapatan asli daerah pasca penerapan otonomi daerah di Kabupaten Bireuen. Manfaat penelitian ini adalah: 1) sebagai acuan pemerintah dalam mengevaluasi sumber PAD yang diperoleh serta dapat menggali lebih optimal lagi potensi yang ada, 2) sebagai peningkatan partisipasi pihak swasta dan masyarakat dalam meningkatkan sumber PAD.

2. Tinjauan Pustaka

Otonomi Daerah

Menurut Hidayat (2008), otonomi daerah adalah hak pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengambil keputusan dan mengimplementasikan berbagai kebijakan yang telah diambil, berdasarkan praksarsa, aspirasi, dan kemampuan yang dimiliki daerah. Lay (2001) menjelaskan bahwa otonomi daerah merupakan jawaban

terhadap persoalan kedaerahan Indonesia, disamping bagi demokrasi, keadilan dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik.

Menurut Apituley, otonomi daerah pada dasarnya bukanlah tujuan, melainkan alat bagi terwujudnya cita-cita keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat. Kebijakan otonomi daerah yang berorientasi kepada kepentingan rakyat tidak akan pernah terwujud apabila pada saat yang sama agenda demokratisasi tidak terwujud. Dengan kata lain, otonomi daerah di satu sisi bisa meminimalisasi konflik pusat daerah dan di sisi lain dapat menjamin cita-cita keadilan, demokrasi, kesejahteraan bagi masyarakat, hanya mungkin diagendakan dalam kerangka besar demokratisasi kehidupan bangsa di bidang politik, hokum dan ekonomi.

Pendapatan Asli Daerah

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menjelaskan bahwa pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mendefinisikan pendapatan asli daerah adalah sesuatu yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat diukur dengan uang karena kewenangan (otoritas) yang diberikan masyarakat dapat berupa hasil pajak daerah dan retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah serta lain-lain pendapatan yang sah. Sukirno (2001) menjelaskan pendapatan asli daerah adalah suatu penerimaan dari beberapa sektor yang masuk dalam pendapatan daerah.

Elemen-elemen penerimaan Pendapatan Asli Daerah yaitu:

- (1) Pajak Asli Daerah
- (2) Retribusi Daerah
- (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
- (4) Lain-lain Penerimaan PAD yang sah.

(Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004)

Menurut Robert (2003) faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah berasal dari penerimaan berbagai sektor, seperti sektor pajak, sektor industri,

pertanian, pertambangan dan energy, perhubungan, pariwisata, jasa, perikanan, kehutanan, perdagangan dan kelautan.

Sidik (2002), menjelaskan bahwa upaya yang perlu dilakukan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah adalah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah antara lain dilakukan dengan cara-cara berikut:

- 1) Memperluas basis penerimaan
- 2) Memperkuat proses pemungutan
- 3) Meningkatkan pengawasan
- 4) Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan
- 5) Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.

Penelitian Relevan

Aryanto (2011) dalam judul penelitian “Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan”. Kesimpulan penelitian adalah adanya otonomi daerah menunjukkan adanya ketidakmandirian keuangan/kota di Sumatera Selatan, sama halnya adanya penurunan kategori keuangan yang dihubungkan dengan Ratio Keuangan Kecukupan Diri (RKKD) di bawah 20%. Ini berarti bahwa kabupaten/kota masih tergantung penuh terhadap pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 5,21% yang mempengaruhi pertumbuhan PAD yang belum memberikan peranan tambahan terhadap anggaran wilayah. Berdasarkan analisis tipologi klassen, kota Palembang dan Muara Enim adalah dua wilayah kota yang memiliki kategori belum maju. Berdasarkan pemetaan kapasitas keuangan wilayah di Sumatera Selatan, ada 5 kabupaten yang memiliki peranan terhadap PAD dan memiliki pertumbuhan pendapatan yang baik.

Ga’I, Hidayat dan Santoso (2010) dalam judul penelitian “Kajian Kesiapan Maumere Menjadi Kota Otonom”. Dengan analisis evaluatif dan pendekatan kuantitatif, dengan analisis kependudukan, analisis kemampuan ekonomi dan keuangan, serta indeks pelayanan publik, yang membandingkan faktor dan indikator

yang sama antara calon daerah otonom dengan daerah induknya, atau daerah-daerah lain dalam satu provinsi atau dengan daerah-daerah otonom lainnya di wilayah Indonesia maka dilakukan pembobotan. Untuk pembobotan masing-masing variabel digunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) di mana akan diminta pendapat para ahli yang berkompeten di bidang pengembangan wilayah dan pemekaran terkait urutan bobot masing-masing variabel. Setelah dilakukan pembobotan dan scoring terhadap nilai setiap indikator, maka diketahui tingkat kesiapan calon Kota Maumere untuk menjadi kota otonom, dengan hasil “Kurang mampu” untuk menjadi kota otonom.

Darmono (2010) dalam judul penelitian “Analisis Dana Bagi Hasil Pajak Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah Di Kabupaten Berau”. Penelitian ini menyimpulkan otonomi daerah memberikan pengaruh bagi penerimaan Daerah Kabupaten Berau pada pos penerimaan dana bagi hasil pajak, dimana penerimaan dana bagi hasil pajak semakin tinggi setelah terjadi otonomi daerah dan diharapkan besarnya rentang peningkatan dana bagi hasil pajak lebih besar dibandingkan dengan keadaan yang ada saat ini. Oleh karena itu untuk meningkatkan penerimaan dana bagi hasil pajak maka sebaiknya dilakukan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber penerimaan yang dapat mempengaruhi perolehan dana bagi hasil pajak tersebut, misalnya pencarian sumber-sumber penerimaan baru yang selama ini belum tergali dan intensifkan sumber penerimaan yang telah ada sehingga hasilnya lebih optimal, atau melalui himbauan kepada masyarakat untuk selalu taat membayar kewajibannya demi peningkatan penerimaan daerah karena akan dapat digunakan demi kemajuan pembangunan daerah mereka.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Data yang dikumpulkan merupakan data sekunder yaitu pendapatan asli daerah pasca penerapan otonomi daerah tahun 2004 sampai dengan 2010. Analisis data dilakukan dengan tahapan-tahapan: 1) reduksi data yaitu pemilihan tentang relevan tidaknya

antara data dengan tujuan penelitian, 2) informasi dari lapangan sebagai bahan mentah diringkas, disusun lebih sistematis, serta ditampilkan pokok-pokok yang penting sehingga lebih mudah dikendalikan dalam penarikan kesimpulan, 3) verifikasi data, kegiatan ini dikumpulkan untuk mencari hubungan, persamaan atau perbedaan. Verifikasi dimaksudkan agar penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut lebih tepat dan obyektif, 4) penarikan kesimpulan dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.

4. Hasil dan Pembahasan Penelitian

4.1. Hasil Penelitian

Setelah ditetapkan otonomi daerah, perkembangan pendapatan asli daerah Kabupaten Bireun dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Persentase Perkembangan Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Sumber	Realisasi	PAD (Rp)	%
2004	Pajak daerah	1.436.843.829,-	4.000.660.364,-	-
	Retribusi daerah	977.507.158,-		
	Laba BUMD	220.000.000,-		
	Lain-lain pendapatan asli yang sah	1.366.309.377,-		
2005	Pajak daerah	2.490.976.458,-	7.066.430.199,-	43,38
	Retribusi daerah	2.824.842.017,-		
	Laba BUMD	193.602.814,-		
	Lain-lain pendapatan asli yang sah	1.557.008.910		
2006	Pajak daerah	2.657.145.793,-	11.778.321.078,-	40,00
	Retribusi daerah	3.922.237.145,-		
	Laba BUMD	1.848.856.339,-		
	Lain-lain pendapatan asli yang sah	3.361.776.461,-		
2007	Pajak daerah	3.462.596.509,-	13.593.522.043,-	13,35
	Retribusi daerah	6.227.234.601,-		
	Laba BUMD	2.086.319.309,-		
	Lain-lain pendapatan asli yang sah	1.817.371.624,-		

Tahun	Sumber	Realisasi	PAD (Rp)	%
2008	Pajak daerah	4.297.523.098,-	18.872.900.357,-	27,97
	Retribusi daerah	7.135.766.544,-		
	Laba BUMD	2.165.571.295,-		
	Lain-lain pendapatan asli yang sah	5.274.039.420,-		
2009	Pajak daerah	4.003.555.692,-	33.421.632.537,-	43,53
	Retribusi daerah	6.672.975.463,-		
	Laba BUMD	2.116.535.106,-		
	Lain-lain pendapatan asli yang sah	20.628.566.476,-		
2010	Pajak daerah	546.410.355,-	15.724.430.350,-	-112,55
	Retribusi daerah	1.247.809.955,-		
	Laba BUMD	(20.289.886,-)		
	Lain-lain pendapatan asli yang sah	13.950.499.926,-		

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa perkembangan pendapatan asli daerah dari tahun 2004 sampai dengan 2009 terus meningkat. Namun, perkembangan pendapatan asli daerah turun drastis pada tahun 2010. Penyebab turunnya pendapatan asli daerah adalah adanya kerugian dari badan usaha milik daerah sebesar Rp. 20.289.886,- serta sedikitnya penerimaan dari pajak daerah yaitu sebesar Rp. 546.410.355,- dan retribusi daerah sebesar Rp. 1.247.809.955,-.

Sumber penerimaan pajak mengalami peningkatan secara terus menerus dari tahun 2004 sampai dengan 2009. Pada tahun 2009, penerimaan pajak mencapai Rp. 4.003.555.692,-. Namun, pada tahun 2010 penurunan penerimaan pajak hingga sebesar Rp. 546.410.355,-

Sumber penerimaan terbesar dan mengalami peningkatan adalah retribusi daerah dari tahun 2004 sampai dengan 2009. Retribusi daerah Kabupaten Bireuen sangat meningkat pada tahun 2008 yaitu sebesar Rp. 7.135.766.544,-. Namun pada tahun 2010, retribusi daerah mengalami penurunan yakni hanya sebesar Rp. 1.247.809.955,-.

Sumber penerimaan dari laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) rata-rata perkembangannya sama dari tahun 2004-2009. Dan pada tahun 2010, mengalami

penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sehingga minus sebesar Rp. 20.289.886,- atau mengalami kerugian.

Sumber penerimaan lain-lain pendapatan asli yang sah pada tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar Rp. 20.628.566.476,-. Peningkatan ini terjadi karena adanya peningkatan kas daerah dari setoran BUD, Dipenda, dan lain-lain perkebunan.

4.2. Pembahasan Penelitian

Hasil penelitian menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah Kabupaten Bireuen mengalami peningkatan dari tahun 2004 sampai dengan 2009. Pada tahun 2010 pendapatan asli daerah mengalami penurunan yang sangat drastis yang diakibatkan turunnya sumber penerimaan dari pajak, retribusi daerah serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mengalami kerugian. Kerugian BUMD merupakan hal yang harus diperhatikan oleh semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Perkembangan pendapatan asli daerah menjadi acuan evaluasi diri pemerintah daerah dalam memperbaiki serta meningkatkan pendapatan asli daerah di tahun-tahun berikutnya. Tahun 2010 jelas terlihat perekonomian Kabupaten Bireuen mengalami resesi. Recovery perekonomian dapat dilakukan dengan menggali sumber daya dan potensi daerah.

Sistem otonomi daerah mewajibkan pemerintah daerah Kabupaten Bireuen harus mampu menemukan potensi-potensi daerah yang selama ini belum terlihat secara optimal. Pemetaan sektor di Kabupaten Bireuen belum berjalan, salah satunya adalah adanya kawasan industri yang tidak ada industrinya sampai sekarang. Perkembangan berbagai sektor usaha pertanian, perkebunan, kelautan, UMKM juga sangat mendukung peningkatan pendapatan asli daerah.

5. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah:

- 1) Perekonomian Kabupaten Bireuen mengalami recovery dari tahun 2004 sampai dengan 2009. Namun pada tahun 2010, perekonomian mengalami resesi.
- 2) Sumber penerimaan pendapatan asli daerah belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dengan kerugian BUMD yang dialami sebesar Rp. 20.289.886,-.
- 3) Sumber penerimaan pajak, retribusi daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sudah mulai meningkat.

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah:

- 1) Pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah harus dapat mengevaluasi penyebab keberhasilan dan kegagalan peningkatan sumber pendapatan asli daerah.
- 2) Melalui otonomi daerah, pihak pemerintah, swasta dan masyarakat dapat menggali potensi-potensi daerah Kabupaten Bireuen.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryanto, Rudi. (2011). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmiah*. Vol. III. No.2
- Apituley. *Pengawasan Penggunaan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. <http://journal.uniera.ac.id/jview/37>
- Darmono (2010). Analisis Dana Bagi Hasil Pajak Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah Di Kabupaten Berau. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*. Vol. II, No. 2.
- Ga'I, Ardiyanto Maksimilianus; Hidayat, Wahyu; Santoso, Budi Hendratno. (2010). Kajian Kesiapan Maumere Menjadi Kota Otonom. *Jurnal Tata Kota dan Daerah*. Vol. 2, No.1

- Hidayat, Syarif. (2008). Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dalam Perspektif State Society Relation. *Jurnal Poelitik*. Vol. 1, No. 1.
- Lay, Cornelis. (2001). Otonomi Daerah dan KeIndonesiaan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol. 5, N0. 2.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Robert, Lucas. (2003). On The Mechanics of Economics Development. *Journal of Monetary Economics*.
- Sidik, Machfud. (2002). *Upaya-Upaya Peningkatan PAD*. Rineka cipta. Jakarta.
- Sukirno,S. (2001). *Ekonomi Mikro*. Gramedia Grafika. Jakarta.